



Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

LKIP

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. LKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 – 2026.

Dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan secara baik dan benar (*good governance*), sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sehingga menuntut kami untuk bekerja lebih keras dan fokus dari periode sebelumnya, terutama dalam menghadapi kendala dan masalah yang selalu dinamis setiap saat.

Dalam LKIP Tahun 2024 ini disampaikan tentang RENSTRA dan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan selama Tahun 2024, yang di dalamnya diuraikan tentang:

1. Arah kebijakan, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
2. Tujuan, sasaran strategis dan indikator organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran; dan
3. Evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja serta tingkat keberhasilan kinerja.

Dengan uraian-uraian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Januari 2025

B/K KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas	
Ahli Pertama-Pranata Komputer	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum dan Potensi Kelautan Perikanan	1
1.3 Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	4
1.4 Jumlah Pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan.....	8
1.5 Sumber Daya Aset.....	8
1.6 Isu-Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 - 2023	10
a. Tugas dan Fungsi.....	10
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	12
c. Strategi dan Arah Kebijakan	13
2.2 Program/ Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan	14
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	18
2.4 Perjanjian Kinerja	19
2.4.1. Perjanjian Kinerja Utama	19
2.4.2. Perjanjian Kinerja Program (outcome)	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	22
3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja	24
3.1.3. Pengukuran Indikator Kinerja	24
3.1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	47
3.2 Realisasi Anggaran	48
3.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023	48
3.2.2. Realisasi Pendapatan Tahun 2023	51
BAB IV PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran	53

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam menjabarkan tugas dan fungsi kewenangan pengelolaan bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya untuk melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berdasarkan suatu strategi perencanaan yang sistematis, yang dalam hal ini telah dirumuskan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA 2024 – 2026).

Tujuan dari pembangunan Kelautan dan Perikanan jangka 2 (Dua) Tahun (2024 – 2026) adalah MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL. Berdasarkan tujuan di atas pada Tahun 2024 ditetapkan sasaran strategis Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penjabaran tujuan secara kuantitatif, yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan target indikator kinerja Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian sebesar 2,79%;
2. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dengan target indikator kinerja Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah sebesar 1%;
3. Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan dengan target indikator kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan senilai 100 dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan senilai 100;
4. Meningkatnya status pangan berbasis perikanan dengan target indikator kinerja Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan sebesar 56 kg/kapita/tahun;
5. Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan dengan target indikator kinerja Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate sejumlah 12 jenis produk olahan;
6. Perairan Laut yang bebas IUU Fishing dengan target indikator Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing) sebesar 6,8%;
7. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola dengan target indikator Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola 790.420 Ha.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2024 mengelola anggaran yang difasilitasi dari APBD sebesar Rp. 47.394.205.908,- (**Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah**) dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp. 47.151.572.967,- (**Empat Puluh Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah**) dengan realisasi keuangan TA. 2024 sebesar Rp. 44.466.712.289,- (**Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah**) atau mencapai persentase 94,31% (**Sembilan Puluh Empat Koma Tiga Puluh Satu Persen**).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengisyaratkan bahwa Kepala OPD menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Akuntabilitas capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang Tahun 2024 disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan sarana keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintahan dalam mengkomunikasikan kinerja penyelenggaraan pembangunan, sekaligus alat penilaian dan pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih yang bertujuan untuk:

- a. Mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program kegiatan dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi;
- b. Pengambilan keputusan kearah perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku;
- c. Perbaikan dalam perencanaan demi terwujudnya visi dan misi dari organisasi.

1.2. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI KELAUTAN PERIKANAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wilayah kepulauan dengan luas wilayah daratan \pm 47.349,9 km² (19,14%) dan memiliki lautan dengan luas \pm 200.000 km² dengan panjang garis pantai \pm 5.726 km. Provinsi ini memiliki keanaekaragaman flora dan fauna yang menawan dan perlu dieksplor serta dilestarikan. Kekayaan bahari seharusnya mampu menjadi penggerak perekonomian dan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terletak di 8^o – 12^o LS dan 118^o – 125^o BT dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 609 buah yang terdiri atas 432 pulau bernama dan 44 pulau yang berpenghuni. Terdapat 808 desa pantai dengan jumlah penduduk di daerah pesisir sebanyak \pm 1.300.000 jiwa. Hasil perhitungan Angka Konsumsi Ikan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan angka 55,60 kg/kapita/tahun. Kondisi ini didukung oleh pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan serta kondisi potensi yang ada.

Upaya untuk membangun dinamika pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan didukung dengan peluang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang terdistribusi pada

tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang masuk dalam wilayah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, masing-masing WPP-NRI 573, WPP-NRI 713, WPP-NRI 714 dan berbatasan dengan wilayah negara Timor Leste dan Australia yang secara keseluruhan pada ketiga WPP tersebut Jumlah Tangkapan yang Dibolehkan (JTB) sebesar 393.360 ton/tahun dengan nilai pemanfaatan sebesar 191.000 ton/tahun (48,55%).

Tabel 1.1 Potensi Sumberdaya Ikan pada 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan

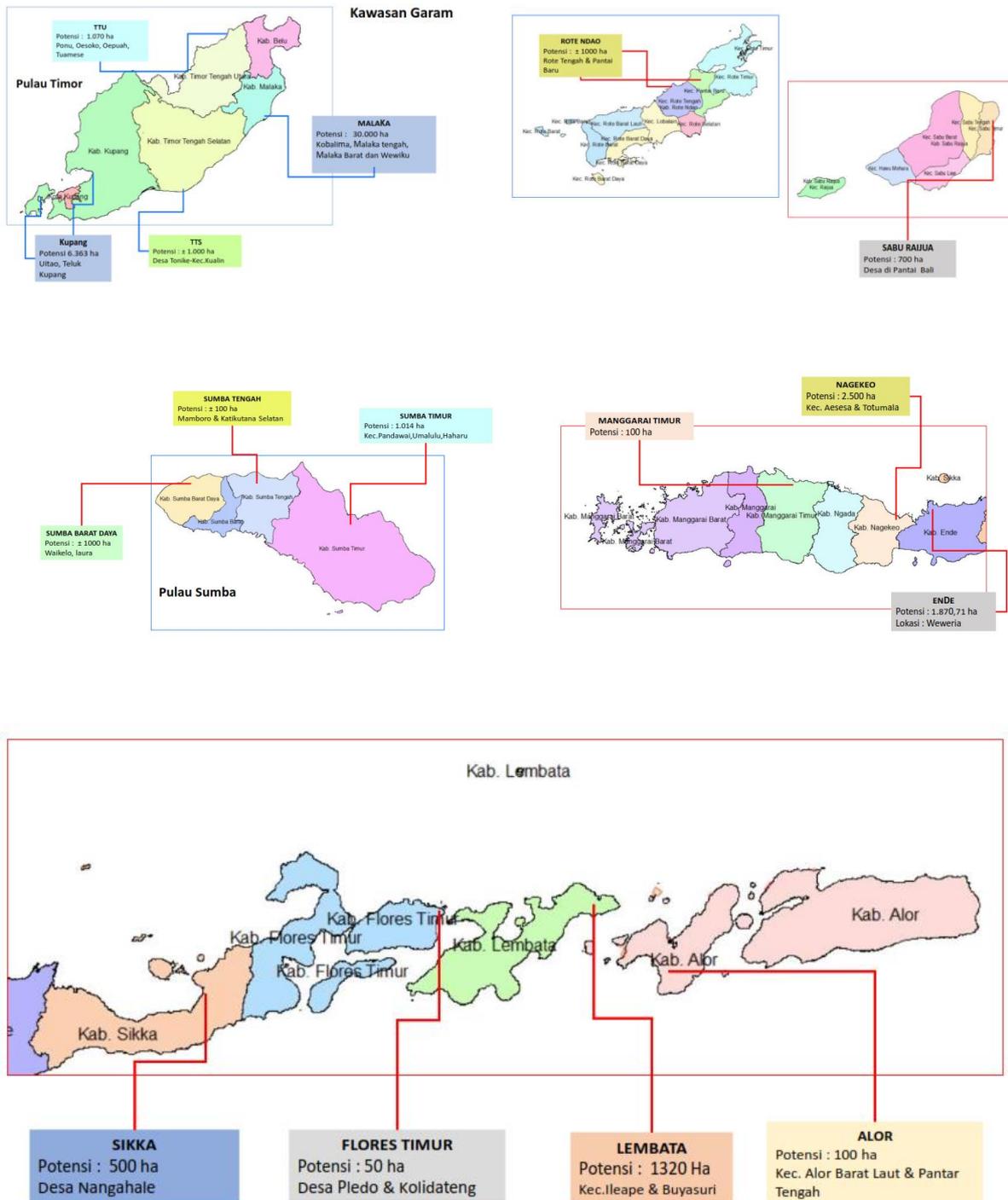
No	Jenis Ikan	Potensi Sumber Daya Ikan (Ton)		
		WPPNRI 573	WPPNRI 713	WPPNRI 714
1	Ikan Pelagis Kecil	630.521	208.414	165.944
2	Ikan Pelagis Besar	586.128	645.058	304.293
3	Ikan Demersal	7.902	252.869	98.010
4	Ikan Karang	22.045	19.856	145.530
5	Udang Penaeid	7.340	30.404	3.180
6	Lobster	970	927	724
7	Kepiting	526	4.347	1.145
8	Rajungan	3.913	5.463	1.669
9	Cumi-Cumi	8.195	10.519	68.444
Total		1.260.934	1.177.857	566.891

Sumber: KepMen KP Nomor 50 Tahun 2017

Selain potensi perikanan tangkap, perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya mempunyai peluang yang sangat besar untuk pengembangan perikanan budidaya, sesuai dengan lingkungan strategis dan potensi sumber daya lahan yang tersedia. Luas lahan budidaya laut yang tersedia mencapai 53.727 Ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 22,6% atau seluas 12.150 Ha. Potensi budidaya air payau seluas 35.455 Ha dengan tingkat pemanfaatan sebesar 4,3% atau seluas 1.510 Ha. Sedangkan luas lahan untuk budidaya air tawar mencapai 51.870 Ha tetapi tingkat pemanfaatan baru mencapai 1,7% atau seluas 910 Ha.

Potensi target konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi terumbu karang, lamun, mangrove, mamalia laut, ikan ekonomis penting, penyu dan hiu tikus. Persentase zona inti kawasan melindungi target konservasi sebesar 18%. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 4 kawasan yaitu Taman Perairan Kepulauan Alor dan Sekitarnya, KKPD Flores Timur, KKPD Sikka, KKPD Lembata.

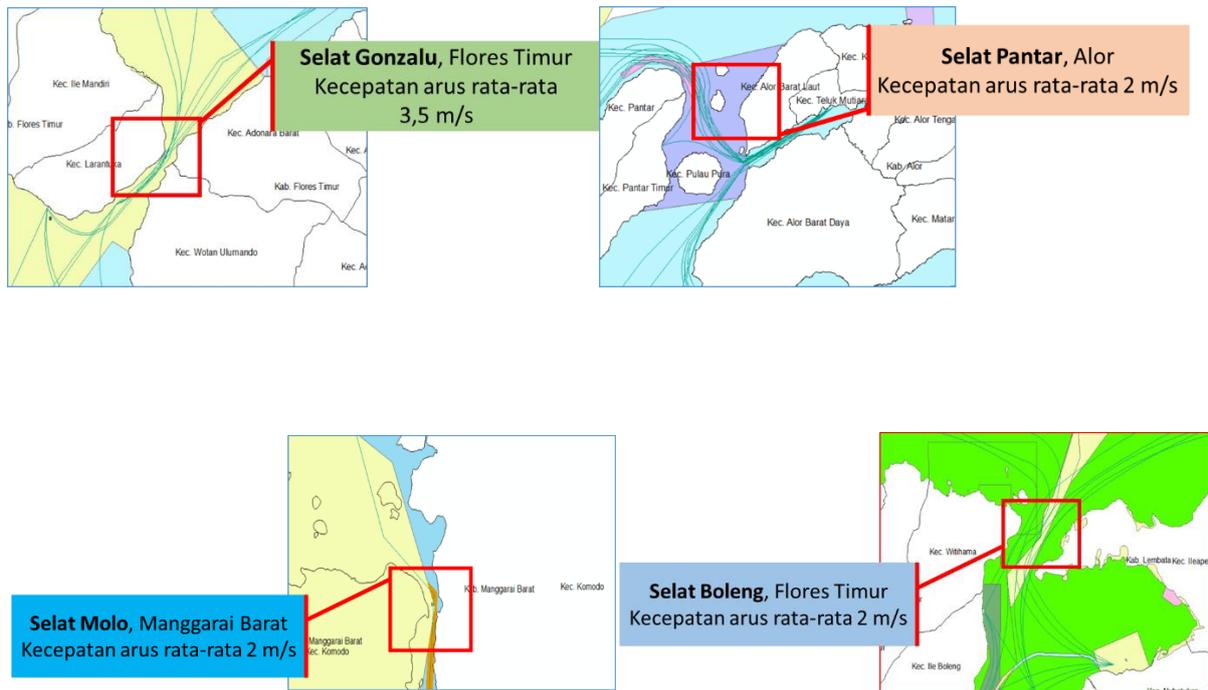
Potensi lainnya yang dapat dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah industri garam. Potensi kawasan garam yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota tergambar dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Potensi Kawasan Garam di wilayah Nusa Tenggara Timur

Salah satu kebijakan dalam pembangunan sektor kelautan adalah pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kebijakan peningkatan pemakaian EBT diarahkan untuk memanfaatkan potensi laut sebagai sumber energi utama. Perairan NTT memiliki potensi EBT yang bersumber dari 3 (tiga) sumber energi utama yaitu arus laut, gelombang laut dan temperatur laut. Lokasi potensial

bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di NTT adalah Selat Pantar, Selat Gonzalu, Selat Bolong dan Selat Molo.



Gambar 1.2 Potensi Energi Baru Terbarukan di Nusa Tenggara Timur

1.3. SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya;
 2. Bidang Perikanan Tangkap;
 3. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD; dan
- f. Cabang Dinas;

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya yang berada di Kalabahi Kabupaten Alor merupakan UPTD di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Timor diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 yakni melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (Dua Belas) mil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. Pembinaan dan pengembangan program pengelolaan kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. Pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil;

- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi di wilayah kerjanya, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

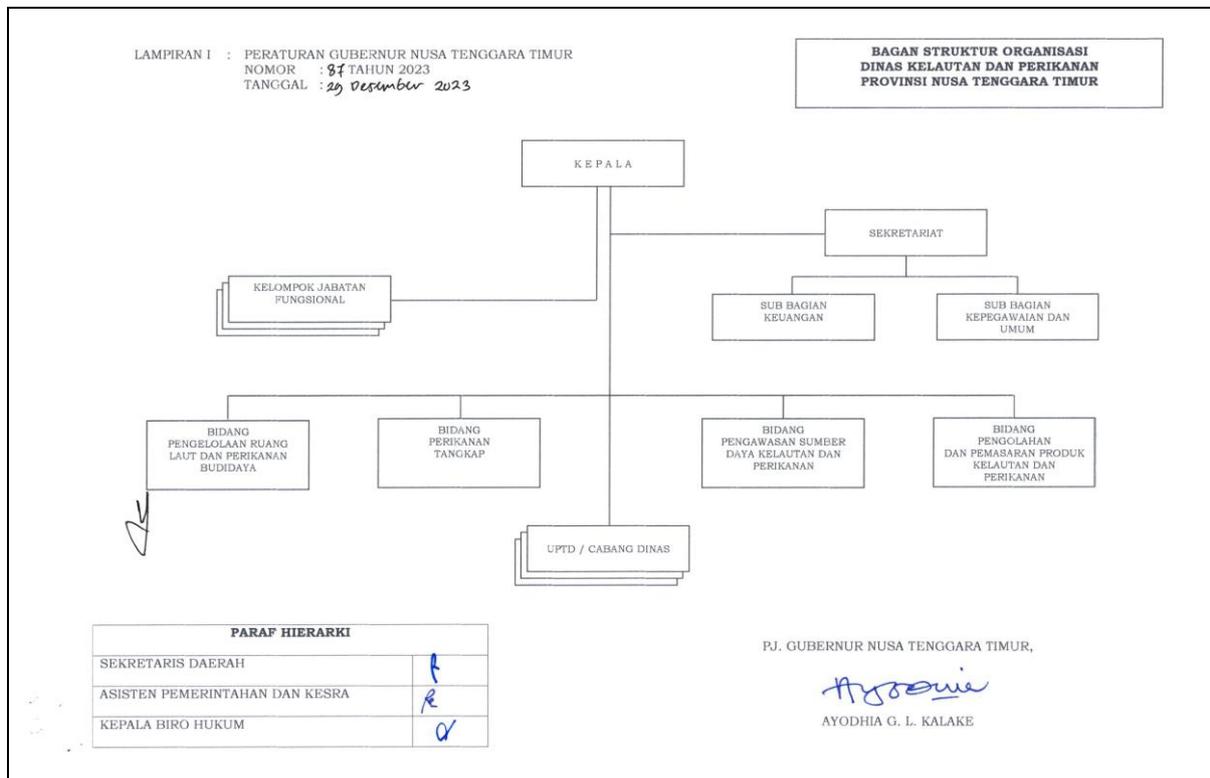
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, data dan evaluasi, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang di bidang pengelolaan kelautan dan pengelolaan perikanan di wilayah kerjanya;
- g. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pengelolaan kelautan dan pengelolaan perikanan di wilayah kerjanya;
- h. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan kelautan dan pengelolaan perikanan di wilayah kerjanya;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari:

- a. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka di Atambua.
- b. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Sikka di Larantuka.
- c. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo di Ende.
- d. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Manggarai Timur, Kabuapten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

- e. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Waingapu.

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tergambar dibawah ini.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

1.4. JUMLAH PEGAWAI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di dukung oleh 136 PNS yang tersebar pada Kantor Dinas dan 7 Cabang Dinas dengan rincian jumlah pegawai sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	S3 (Doktor)	-	1	1
2.	S2 (Pasca Sarjana)	7	5	12
3.	S1 (Sarjana/Diploma-IV)	49	33	82
4.	Sarmud/Diploma III	2	2	4
5.	SLTA/Sederajat	22	3	25
6.	SMP/Sederajad	4	-	4
7.	SD/SR	1	-	1
TOTAL		85	44	129

1.5. SUMBER DAYA ASET

Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dalam waktu tahun 2013 – 2024 telah memiliki aset-aset sebagai berikut:

- Tanah seluas 618.487 m² yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota dengan nilai sebesar Rp 86.652.207.019,31,-;
- Gedung dan Bangunan sejumlah 135 unit dengan nilai sebesar Rp 35.378.812.532,-;
- Kendaraan roda 6 berjumlah 1 unit;
- Kendaraan roda 4 berjumlah 16 unit dengan rincian 9 unit kendaraan di Kantor Dinas dan 7 unit di masing-masing Cabang Dinas;
- Kendaraan roda 3 berjumlah 3 unit;
- Kendaraan roda 2 berjumlah 58 unit yang tersebar di Kantor Dinas sejumlah 32 unit dan sisanya di Cabang Dinas.

1.6. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness and Growth). Berbagai permasalahan/isu tadi dibobot dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Tabel 1.3 Analisis USG Permasalahan Utama Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Permasalahan	Nilai Skala Bobot (1-5)			Total Skor
		Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	
1	Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir	5	5	5	15
2	Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya ikan	4	4	5	13
3	Kerusakan wilayah perairan	4	4	5	13
4	Belum optimalnya pemanfaatan perairan untuk budidaya rumput laut	4	5	4	13
5	Tingginya angka stunting di NTT	5	5	5	15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024-2026

a. Tugas dan Fungsi

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2024 – 2026 disusun dengan merujuk pada Periode ke 4 RPJPD Provinsi NTT 2005-2025, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi NTT. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan di dalam Renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta indikator yang digunakan sebagai alat ukur yang saling melengkapi.

Prioritas kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2019–2024 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan IPTEK yang terus meningkat melalui terobosan Revolusi Industri 4.0. Pada arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT, prioritas yang termuat dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025, untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat di bawah slogan **“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Adapun Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas kelautan dan perikanan memiliki uraian tugas dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Analisis Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir	Pemasaran masih didominasi oleh penjualan domestik sehingga harga jual ikan masih relatif rendah	Masih rendahnya investasi (<i>buyer</i>) dibidang ekspor produk perikanan
2	Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya ikan	Masih rendahnya SDM dan belum masuknya teknologi terapan tepat guna di bidang penangkapan dan budidaya ikan	Melakukan pembinaan dan <i>pilot project</i> untuk teknologi tepat guna di bidang penangkapan dan budidaya ikan
3	Kerusakan wilayah perairan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan belum optimalnya upaya pengawasan	Belum optimalnya sosialisasi tentang kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan terbatasnya sarpras pengawasan
4	Belum optimalnya pemanfaatan perairan untuk budidaya rumput laut	Belum terpenuhinya penyediaan bibit unggul rumput laut	Terbatasnya kebun bibit unggul rumput laut yang diperbanyak melalui seleksi varietas dan kultur jaringan
5	Rendahnya angka konsumsi ikan dalam rangka pemenuhan gizi untuk penanganan stunting di NTT	Masih rendahnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) di kalangan masyarakat NTT	Masih belum terjangkaunya harga ikan dan distribusi ikan di daerah pelosok dan kurangnya sosialisasi GEMARIKAN di Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, adapun yang menjadi permasalahan pada sektor kelautan dan perikanan, yaitu pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir; masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya oleh nelayan; kerusakan wilayah perairan; belum optimalnya pemanfaatan budidaya rumput laut; dan rendahnya angka konsumsi ikan dalam rangka pemenuhan gizi untuk penanganan stunting di NTT.

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan yaitu sebanyak 2 (dua) rumusan:

1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial; dan
2. Mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari 2 (dua) tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis, yaitu:

1. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB;
2. Meningkatnya PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah;
3. Meningkatnya status pangan berbasis perikanan;
4. Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan;
5. Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan
7. Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing;

Adapun rincian tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disajikan pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2 Analisis Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	Meningkatnya kontribusi kelautan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian (%)	
	Meningkatnya kontribusi PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah (%)	
	Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan		Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sektor perikanan
			Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan
	Meningkatnya status pangan berbasis perikanan	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan (kg/kapita/tahun)	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate (Jenis)
Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Perairan Laut yang bebas IUU Fishing	Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing) (%)
	Kawasan Konservasi perairan Daerah yang terkelola	Cakupan luas kawasan perairan daerah yang dikelola (Ha)

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Pembangunan kelautan dan perikanan di Nusa Tenggara Timur akan dipengaruhi faktor sumber daya seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sumberdaya lainnya, termasuk sarana dan prasarana pendukung.

Pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga akan dipengaruhi oleh faktor politis berupa arahan kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Faktor arahan kebijakan tersebut akan menentukan pola, bentuk dan mekanisme dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, tingkat volume produksi/ pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, ketersediaan dukungan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta berbagai aspek lainnya yang terkait.

Penjelasan lebih lanjut tersaji dalam tabel di bawah ini tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, yaitu 2024 – 2026.

Tabel 2.3 Analisis Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaran: Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi sumberdaya perikanan dalam rangka peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.1. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 1.2. Operasional Pelabuhan Kewenangan Provinsi
2. Restrukturisasi armada penangkapan ikan	2.1. Perijinan perikanan tangkap
3. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3.1. Peningkatan produktifitas budidaya rumput laut 3.2. Peningkatan produktifitas budidaya ikan

	3.3. Peningkatan Rekomendasi Perizinan Budidaya
4. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Penguasaan Teknologi	4.1. Bimbingan Teknis dan Pelatihan kepada Nelayan dan Pembudidaya 4.2. Diversifikasi produk pasca panen 4.3. Penyediaan Asuransi bagi nelayan dan pembudidaya

Sasaran: Meningkatnya angka konsumsi ikan

Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi Distribusi dan Pengolahan produk hasil Perikanan tangkap dan Budidaya	1.1. Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) 1.2. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) 1.3. Pengujian mutu produk hasil perikanan 1.4. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) 1.5. Ijin Usaha Pemasaran dan Pengolahan (SIUP)

Sasaran: Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil

Strategi	Arah Kebijakan
1. Menghitung dan memetakan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang pariwisata bahari	1.1. Daya dukung daya tampung lingkungan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil 1.2. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove 1.3. Ijin lokasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil
2. Melakukan penetapan pengelolaan kawasan konservasi	2.1. Pengelolaan kawasan konservasi

Sasaran: Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing

Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan guna menurunkan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulated, Unreported Fishing)	1.1. Peningkatan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 1.2. Pembinaan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan

2.2. PROGRAM/ KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Kebijakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka kebijakan pembangunan dijabarkan kembali pada suatu program yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program	Kegiatan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 2.2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 3.2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3.3. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3.4. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 4.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan diatas, maka selanjutnya dijabarkan kedalam masing-masing Sub Kegiatan beserta anggaran pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.5 Penjabaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.018.762.947
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	753.139.731
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	42.227.963
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	700.911.768
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.867.584.999
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.825.797.999
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.787.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.240.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.240.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.520.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.680.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000
	Penyediaan Bahan/Material	38.240.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.705.000
	Pengadaan Mebel	44.935.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.770.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.651.478.817
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.760.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	849.568.677
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.757.150.140
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.094.400
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.094.400
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.289.854.000
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	379.854.000
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	321.854.000
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	58.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	910.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	910.000.000

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU (Rp)
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	24.314.540.020
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	5.272.354.860
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	30.000.000
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5.242.354.860
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.500.000
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	2.500.000
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.852.160
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	49.852.160
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	18.989.833.000
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	5.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	18.984.833.000
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.646.497.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	14.526.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	14.526.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.631.971.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.616.971.000
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
5.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	866.919.000
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	866.919.000
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	257.304.000
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	134.000.000
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	34.665.000
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	440.950.000
6.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.000.000
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	15.000.000
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	15.000.000

Sebagai bagian dari proses pembangunan nasional, maka bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi program prioritas yang difasilitasi dana APBN yang terdiri dari 6 (enam) program Tugas Pembantuan dan 1 (satu) program Dekonsentrasi dengan total anggaran sebesar Rp 3.125.513.000,-

Tabel 2.6 Penjabaran Program dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Pagu Anggaran Tahun 2023

No.	Kode/ Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	690948 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (01) TP	244.748.000
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	244.748.000
2.	249169 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (03)TP	1.008.395.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.008.395.000
3.	249170 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (04)TP	236.177.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	236.177.000
4.	690993 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (05)TP	197.752.000
	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	197.752.000
5.	691031 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (06)TP	250.197.000
	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	250.197.000
6.	691069 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (07)TP	1.084.304.000
	Program Pengelolaan Ruang Laut	1.084.304.000
7.	249086 SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (05)DK	107.940.000
	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	107.940.000

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berisikan program/ kegiatan tahunan dan anggaran pelaksanaan program/ kegiatan tersebut, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Tahun 2024-2026. Untuk Tahun 2024, Rencana Kinerja Tahunan Dinas ditetapkan capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Menurut PERMENPAN-RB Tahun 2014 bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, maka target kinerja yang diperjanjikan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, sebagai berikut:

2.4.1. Perjanjian Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah (Gubernur) dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT 2024 - 2026. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis. Untuk Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 4 (Empat) sasaran strategis dengan 5 (delapan) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Penjabaran Indikator Kinerja, Sasaran Strategis, Target dan Formula Indikator Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Indikator
1.	Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Share PDRB sub sektor perikanan dan Kelautan terhadap PDRB sektor pertanian (%)	2,79	Sumber data BPS
2.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	1%	$\frac{\text{Total PAD PD}}{\text{Total PAD Provinsi}} \times 100$
3.	Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	Nilai Tukar nelayan (NTN) perikanan	100	Sumber data BPS
		Nilai tukar pembudidaya	100	Sumber data BPS
4.	Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sector kelautan dan perikanan	Ketersediaan produk olahan perikanan di pariwisata estate	12	Jumlah produk olahan perikanan

2.4.2. Perjanjian Kinerja Program (*outcome*)

Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Unit Kerja Eselon-III dengan target kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Program (*outcome*). Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja program yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran strategis.

Tabel 2.8 Penjabaran Indikator Kinerja Outcome Terhadap Sasaran Strategis dan Target Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Kuantitas	%
1.	Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola	701.545 Ha	100
2.	Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	186.364 ton	
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1.404.233 ton	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Kuantitas	%
3.	Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing	Penurunan kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported)	10,34	
4.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan	45,92 kg/kapita/tahun	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan terdiri dari indikator-indikator berikut:

- a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan;
- b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (benefit) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil (outcome);
- e. Dampak (impact) menggambarkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak diukur pada periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan dinas.

Cara perhitungan indikator kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dengan melihat kepada kondisi tertentu. Kondisi tersebut, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pemaknaan dari capaian indikator kinerja dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala dan Kategori Penilaian Capaian Indikator

No.	Skala Nilai	Kategori Penilaian
1.	>90	Sangat Memuaskan
2.	>80 - 90	Memuaskan
3.	>70 - 80	Sangat Baik
4.	>60 - 70	Baik
5.	>50 - 60	Cukup
6.	>30 - 50	Kurang
7.	0 - 30	Sangat Kurang

Setiap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diantaranya membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh rata-rata capaian sasaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2024

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Kondisi Awal (2023)
			Target	Capaian	
Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah					
1.	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian	%	2,83	2,79**	2,79**
Sasaran 2: Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah					
2.	Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	%	1	0,17**	0,42
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan					
3.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	Angka	100	89,23**	92,46
4.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	Angka	100	101,96**	104,79
Sasaran 4: Meningkatnya status pangan berbasis perikanan					
5.	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	(kg/kapita/tahun)	56	55.60**	55.61
Sasaran 5 : Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan					
6.	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	Jenis	12	12	12
Sasaran 6 : Perairan Laut yang bebas IUU Fishing					
7.	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)	(%)	6,89	9,25	2,77
Sasaran 7 : Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola					
8.	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	Ha	790.420	701.928,02	701.545,41

Keterangan: ** Data Sementara

3.1.3. Pengukuran Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan atau pencapaian yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penetapan Indikator Kinerja ini adalah untuk:

- a. Mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan untuk penyelenggaraan manajemen yang baik dan benar;
- b. Mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan progresivitas akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.3 Kategori Pencapaian Indikator Kinerja (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2024

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Kondisi Awal (2023)	Kategori
			Target	Capaian		
Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah						
1.	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian	%	2,83	2,79**	2,79**	Sangat Memuaskan
Sasaran 2: Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah						
2.	Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	%	1	0,17**	0,42	Sangat Kurang
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan						
3.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	Angka	100	89,23**	92,46	Memuaskan
4.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	Angka	100	101,96**	104,79	Sangat Memuaskan
Sasaran 4: Meningkatnya status pangan berbasis perikanan						
5.	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	(kg/kapita/tahun)	56	55,60**	55,61	Sangat Memuaskan
Sasaran 5 : Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan						
6.	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	Jenis	12	12	12	Sangat Memuaskan
Sasaran 6 : Perairan Laut yang bebas IUU Fishing						
7.	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)	(%)	6,89	9,25	2,77	Sangat Memuaskan
Sasaran 7 : Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola						
8.	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	Ha	790.420	701.928,02**	701.545,41	Memuaskan

Keterangan: ** Data Sementara

Penjelasan pencapaian masing-masing sasaran Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mendukung indikator kinerja Tahun 2024, dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Indikator kinerja : Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor Pertanian

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Kondisi Akhir Renstra
			Target	Realisasi		
Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah						
1.	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian	%	2,79	2.79**	98,59	2,81

Sub sektor perikanan dan kelautan sampai saat ini tetap memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional maupun regional, baik berupa sumbangan langsung maupun tidak langsung. Sumbangan langsung seperti dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa melalui ekspor dan penekanan inflasi. Sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran sektor kelautan dan perikanan dalam melaksanakan koordinasi dan memberikan fasilitasi bagi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengalokasian anggaran yang mendukung indikator kinerja dimaksud dari **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** sebesar Rp. 24.314.540.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.845.716.057,- atau 98,07%. Selain itu, dukungan dari **Program Perikanan Budidaya** dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.646.497.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.560.067.000,- atau 94,75%. Pada Tahun 2024 kontribusi sub sektor perikanan dan kelautan terhadap pembentukan PDRB sektor pertanian sebesar 2,79% atau telah mencapai 99,29% dari kondisi akhir Renstra.

Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

Indikator kinerja : Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Kondisi Akhir Renstra
			Target	Realisasi		
Sasaran 2: Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah						
2.	Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	%	1	0,17	17	1,2

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditargetkan semakin meningkat setiap tahunnya, meskipun realisasinya cenderung fluktuatif. Pendapatan total Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil serta dana transfer lainnya, yang mengindikasikan derajat kemandirian fiskal yang masih perlu untuk ditingkatkan. Capaian Pendapatan Asli Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 mendukung sebesar 0,17% Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dukungan program terhadap indikator kinerja dimaksud berasal dari **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** sebesar Rp. 24.314.540.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.845.716.057,- atau 98,07%. Selain itu, dukungan dari **Program Perikanan Budidaya** dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.646.497.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.560.067.000,- atau 94,75%. Pada Tahun 2024 kontribusi pendapatan asli daerah Dinas kelautan dan perikanan terhadap pendapatan provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,17% atau 14,17% dari kondisi akhir Renstra.

Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan

Indikator kinerja : - Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan

: - Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Kondisi Akhir Renstra
			Target	Realisasi		
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan						
3.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	Angka	100	89,23**	89.23	104
4.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	Angka	100	101.96**	101.96	104

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai di bawah 10%. Angka pemanfaatan potensi laut tersebut didominasi penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, pelagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil. Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan nelayan/pembudidaya. Data sementara NTN Provinsi NTT senilai 89,23 yang berarti kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, membuat pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Sedangkan NTP Provinsi NTT senilai 101,96 dimana kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga pembudidaya mengalami impas. Dukungan program terhadap indikator kinerja dimaksud berasal

dari **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** sebesar Rp. 24.314.540.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.845.716.057,- atau 98,07%. Selain itu, dukungan dari **Program Perikanan Budidaya** dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.646.497.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.560.067.000,- atau 94,75%.

Sasaran 4 : Meningkatnya status pangan berbasis perikanan

Indikator kinerja : Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Kondisi Akhir Renstra
			Target	Realisasi		
Sasaran 4: Meningkatnya status pangan berbasis perikanan						
5.	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	kg/ kapita/ tahun	56	55,60	99,29	60

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi Kepulauan dengan panjang garis pantai ± 5.700 Km dengan ekosistem yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun yang menjadi tempat berlangsungnya hidup sumber daya ikan. Berdasarkan hal tersebut Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar yang merupakan salah satu sumber protein bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2024 Nilai angka konsumsi ikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 55,60 kg/kapita/tahun. Nilai tersebut di dapat berdasarkan survey yang di lakukan di Empat Kabupaten yakni Kabupaten Sumba Barat, Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Manggarai.

Sasaran 5 : Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan

Indikator kinerja : Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Kondisi Akhir Renstra
			Target	Realisasi		
Sasaran 5: Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan						
6.	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	Jenis	12	12	100	16

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melalui salah satu program yang ada dan mendukung pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan dalam bentuk produk loin tuna, tuna beku, ikan kering, nugget ikan, kaki naga, abon ikan, bakso ikan, sei ikan, otak-otak ikan, es rumput laut, dodol rumput laut dan stik rumput laut. Upaya lainnya yang dilakukan dalam mendukung ketercapaian ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate dengan pemberian bantuan safari GEMARIKAN yang dilakukan di Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat, Desa Oematnunu yang dilaksanakan sebanyak 4 (Empat) kali sepanjang tahun 2024. Realisasi Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate sebesar 12 jenis olahan ikan atau 75% di bandingkan dengan target akhir Renstra.

Sasaran 6 : Perairan Laut yang bebas IUU Fishing

Indikator kinerja : Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi		
Sasaran 6: Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan						
7.	Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)	%	6,89	9,25	134,25	0

Wilayah perairan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi sumber daya ikan yang besar dan terbagi dalam 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yakni WPP-NRI : 573, 713 dan 714. Kondisi ini perlu di jaga agar sumber daya yang tersedia di perairan laut dapat di tingkatkan dan di manfaatkan secara baik. Dinas kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2024 telah melaksanakan gelar operasi di laut yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam menjaga kondisi laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2024 tingkat pelanggaran yang di temukan sebesar 12,70% dari total 63 (Enam Puluh Tiga) Kapal Perikanan yang di periksa, di bandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 9.25% dimana tahun 2023 di temukan 21,95% pelanggaran dari total 41 (Empat Puluh Satu) Kapal Perikanan yang di periksa.

Sasaran 7 : Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola

Indikator kinerja : Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Capaian Akhir Renstra
			Target	Realisasi		
Sasaran 7: Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola						
8.	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	Ha	790.420	701.928,02	88,80	803.326

Kawasan Konservasi yang di kelola oleh daerah provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki total luas sebesar 701.928,02 Ha yang terdiri dari Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, KKPD Sikka, KKPD Flores Timur dan KKPD Lembata. Sedangkan Total luasan kawasan Konservasi yang bersatus pencadangan sebesar 121.719,10 yang tersebar di Ende dan Nagekeo, Belu, serta Malaka. Pada tahun 2024 luasan kawan konservasi ini telah mencapai 87,38% di bandingkan dengan target akhir Renstra.

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Program (output) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Tahun 2024		Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2024)
				Target	Realisasi		
Sasaran: Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil							
1	Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola	Ha	701.545,41	790.420	701.928,02**	803.326	87,38
Sasaran: Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah							
2	Produksi perikanan tangkap	Ton	186.364	200.000	159.149**	210.000	75.79
3	Produksi perikanan budidaya	Ton	1.404.233	1.620.000	1.629.027**	1.889.568	86.21
Sasaran: Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing							
4	Penurunan kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported)	%	10,34	6,89	9,25	0	0
Sasaran: Meningkatnya status pangan perikanan							
5	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	45,92	56,00	55,60**	60**	92.67

Keterangan: ** Data Sementara

Penjelasan pencapaian program/kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mendukung indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.289.854.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.202.480.400,- atau 93,23%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yakni
 - ✚ Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat yang merupakan Tindaklanjut dari penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi proses integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu sub kegiatan ini juga terdiri atas penyediaan sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi. Total Pagu yang di anggarkan pada sub kegiatan ini adalah 379.854.000 dengan realisasi sebesar 305.750.400 atau sebesar 95%.
 - ✚ Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi penanaman anakan mangrove dengan total pagu anggaran sebesar 58.000.000 dan realisasi anggaran sebesar 2.720.000 atau 4,69%.
- Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kegiatan ini memiliki pagu sebesar Rp. 910.000.000,- dengan nilai realisasi sebesar Rp. 896.730.000,- atau sebesar 98,54% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - ✚ Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi Belanja hibah kepada masyarakat berupa geomembran bagi petambak garam dan perjalanan dinas dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan Kegiatan DAK. Bantuan Geomembran tersebut di berikan ke mayarakat di 2 (Dua) kecamatan di Kabupaten Kupang Yakni Kecamatan Sulamu dan Kecamatan Kupang Tengah.
- Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN guna memaksimalkan cakupan wilayah kawasan konservasi daerah, adapun kegiatan yang dimaksud ialah Penyusunan Dokumen Final Kawasan Konservasi sebagai upaya menambah luas kawasan konservasi. Dalam kegiatan ini dilakukan kegiatan identifikasi, penyusunan dokumen final zonasi kawasan konservasi, dan

penetapan kawasan konservasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang mengamanahkan Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kawasan konservasi, baik yang dikelola Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pagu kegiatan sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 246.256.500,- atau 98,50%.

Kegiatan strategis yang terdapat dalam program ini, meliputi:

- Pengembangan kawasan konservasi KKD Flores Timur.

Tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Flores Timur, menjadikan kawasan konservasi ini sebagai lokasi prioritas bagi fokus pembangunan dan pengembangan kelautan. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024, kawasan konservasi ini mendapatkan alokasi berupa:

- ✚ Pengadaan sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi Flores Timur yang merupakan tempat untuk memberikan informasi tentang kawasan konservasi. Pusat informasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu menjadi tempat untuk memberikan informasi tentang kawasan konservasi dan dapat juga difungsikan sebagai kantor lapang untuk kegiatan pengelolaan sehari-hari di lapangan.

- Belanja hibah kepada masyarakat berupa geomembran garam bagi petambak garam. Bantuan Geomembran garam tersebut di berikan ke masyarakat di 2 (Dua) kecamatan di Kabupaten Kupang Yakni Kecamatan Sulamu dan Kecamatan Kupang Tengah.

2. Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.314.540.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.845.716.057,- atau 98,07%. dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 Mil dengan pagu sebesar Rp. 5.272.354.860,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.131.397.900,- atau 97,33% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- ✚ Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Kegiatan ini memiliki keluaran yakni Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 600.000,-

✚ Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap

Kegiatan ini berupa Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagai implementasi dari Program Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya (PEKOSOSBUD-BM) dengan total Pagu sebesar Rp. 5.242.354.860,- dan realisasi Rp. 5.130.797.900,- atau 97,87% di mana bantuan yang di serahkan berupa :

- Alat Tangkap Gilnet Monofilamen sebanyak 23 Unit;
 - Alat Tangkap Gilnet Multifilamen sebanyak 18 Unit;
 - Cool Box 100L sebanyak 34 Unit;
 - Cool Box 200L sebanyak 44 Unit;
 - Kapal Penangkap Ikan 1 GT (Lengkap)/Perahu Jolor 16 Unit;
 - Ketinting dan Peralatan Tangkap sebanyak 39 Unit;
 - Mesin Kapal 3 GT + Gear Box sebanyak 4 unit;
 - Mesin Kapal Perikanan (Motor Ketinting 15 PK) sebanyak 5 Unit;
 - Mesin Kapal Perikanan (Motor Ketinting 5 PK) sebanyak 15 unit.
- Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 49.852.160,- dan realisasi sebesar Rp. 18.634.000,- atau 37,38% dengan rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

✚ Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT memiliki output kegiatan yakni Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan. Selama tahun 2024 jumlah rekomendasi dan ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 2.124 (dua ribu seratus dua puluh empat). Rekomendasi maupun ijin yang dikeluarkan tersebut terdiri dari 437 rekomendasi ijin dan 1.667 izin dengan uraian sebagai berikut :

- Rekomendasi Izin:
 - SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) rekomendasi ijin;
 - SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) rekomendasi ijin;
 - SIKPI (Surat ijin Kapal Pengangkut Ikan) sebanyak 16 (Enam belas) rekomendasi ijin.
- Sedangkan Izin terdiri dari:
 - Pendaftaran Kapal Perikanan (E-BKP NK) Lokal sebanyak 1.667 (seribu enam ratus enam puluh tujuh) Ijin;

Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan..

- Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 18.989.833.000,- dengan realisasi Rp. 18.695.684.157,- atau 98,45% dimana sebagian besar alokasi dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pengerjaan Sarana dan Prasarana pelabuhan perikanan yang tersebar di beberapa lokasi. Kegiatan ini di rincikan pada sub kegiatan berikut:

- ✚ Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Dengan keluaran sub kegiatan yakni Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- akan tetapi selama tahun 2024 tidak terdapat realisasi anggaran pada sub kegiatan tersebut.

- ✚ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.984.833.000,- dengan realisasi Rp. 18.695.684.157,- atau 98,48% dimana sebagian besar merupakan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus berupa pengerjaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan sebagai berikut :

- Pengadaan Penahan Gelombang (breakwater) PP Waingapu;
 - Turap penahan tanah (revetment) PP Waingapu;
 - Turap penahan tanah (revetment) PP Oeba;
 - Dermaga PP Amagarapati;
 - Dermaga PP Waingapu;
 - Kolam Pelabuhan Hukung;
 - Kolam Pelabuhan Waingapu;
 - Tempat Pemasaran Ikan PP Waingapu;
 - Fasilitas Air (tawar) Bersih di PP Amagarapati;
 - Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo) PP Waingapu.

- Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Tangkap juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- ✚ Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan (2337)

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 30.130.00,- dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini berupa Pendaftaran Kapal Perikanan berukuran < 5 GT dan 5-30 GT yang belum memiliki identitas teridentifikasi yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendaftaran kapal perikanan berukuran <5 GT-30 GT yang belum memiliki identitas untuk kegiatan penangkapan ikan (kapal baru/yang belum memiliki identitas teridentifikasi untuk melakukan penangkapan ikan di Fishing Ground).

📌 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (2339), kegiatan ini meliputi:

- Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya

Pagu anggaran sebesar Rp. 57.482.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya identifikasi calon penerima sertifikat hak atas tanah nelayan (SEHAT) Nelayan di 5 kabupaten/kota dengan hasil identifikasi sebanyak 500 peserta dengan rincian pada Kabupaten Kupang 100 peserta, Kabupaten Manggarai Barat 100 peserta dan Kabupaten Timor Tengah selatan 100 peserta, Kabupaten Sumba Barat 100 Peserta dan Kabupaten Alor 100 Peserta.

- Integrasi Sistem Perizinan Daerah ke dalam Sistem Perizinan Pusat-Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan output terlaksananya penerbitan Perjinan Berusaha Usaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perjinan Berusaha Usaha Subsektor Pengangkutan ikan di Bidang Penangkapan Ikan. Dengan sasaran masyarakat Nelayan dan Pelaku Usaha yang belum memiliki ijin/perpanjangan izin penangkapan ikan yang menjadi kewenangan Daerah sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan di Fishing Ground.

- Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya

Pagu anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- dengan output terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan yang

berbadan Hukum di Kab/Kota kegiatan ini dilaksanakan di Kota Kupang.

✚ Pengelolaan Sumber Daya Ikan (2341), total pagu kegiatan ini sebesar 460.180.000,- dengan realisasi sebesar 100% yang terdiri dari kegiatan:

- Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan
Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 7.570.000,- dengan realisasi sebesar 100% yang dilaksanakan di Kota Kupang dengan sasaran dari kegiatan ini nahkoda kapal dan awak kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Fishing Ground. Output dari kegiatan ini adalah terdatanya hasil tangkapan ikan (Log Book) dan posisi kapal dalam melakukan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan.
- Pelaksanaan pembangunan prasarana pemulihan habitat sumber daya ikan dalam mendukung penangkapan ikan terukur
Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 452.610.000,- dengan realisasi sebesar 100% yang dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur dengan sasaran dari kegiatan ini adalah Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan khususnya perbaikan habitat tempat berkembang ikan. Output dari kegiatan ini adalah Terdapatnya pemulihan sumber daya habitat perikanan yang baru.

✚ Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (2342)

- Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
Pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 300.500.000,- dengan sasaran dari kegiatan ini adalah 88 petugas validator di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Pendataan perikanan tangkap di Tahun Anggaran 2024 diinput pada aplikasi Satu Data Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah petugas statistik (yang meliputi: validator dan enumerator) di semua Kabupaten/Kota. Output dari kegiatan ini adalah terdatanya Statistik Perikanan tangkap meliputi data produksi perikanan tangkap untuk tiap jenis ikan, jumlah alat tangkap dan jumlah nelayan untuk tahunan 2024.

- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 65.463.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya Rencana Penganggaran Anggaran Tahun 2024 dan tersusunnya Administrasi Keuangan Bidang Perikanan Tangkap.

Kegiatan strategis yang terdapat dalam program ini, meliputi:

- Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Pada Tahun 2024 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT mendapatkan anggaran sebesar Rp. 22.042.505,- yang terbagi dalam beberapa bidang yakni bidang Perikanan Tangkap, Pengelolaan ruang laut serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Bidang perikanan tangkap sendiri mendapat beberapa paket pekerjaan yang mendukung pembangunan pelabuhan perikanan, antara lain:
 - ✚ Pengadaan Penahan Gelombang (breakwater) PP Waingapu;
Penahan gelombang merupakan salah satu fasilitas pokok pelabuhan perikanan untuk meredam energi gelombang di belakang struktur dan pengurangan transport sedimen tegak lurus pantai, menurunkan tinggi gelombang di pantai dan memperlambat angkutan sedimen ke arah pemecah gelombang antara lain berupa bulkhead dan struktur ambang rendah. Dengan pagu senilai Rp 2.250.000.000,- dan total nilai kontrak Rp 2.239.500.000, pekerjaan ini terealisasi 100% dan diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
 - ✚ Turap penahan tanah (revetment) PP Waingapu;
Turap penahan tanah (revetment) di dermaga ini berfungsi untuk menahan tanah agar tidak longsor dan melindungi dermaga atau pelabuhan. Total pagu kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- total nilai kontrak sebesar Rp. 1.297.800,- dengan realisasi sebesar 100%.
 - ✚ Turap penahan tanah (revetment) PP Oeba;
Turap penahan tanah (revetment) PP Oeba dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.002.000.000,- total nilai kontrak sebesar Rp. 1.862.800.000,- dan terealisasi sebesar 100%.
 - ✚ Dermaga PP Amagarapati;
Dermaga merupakan salah satu fasilitas pokok pelabuhan perikanan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang

dan menaikturunkan penumpang atau barang. Pada Tahun 2024, PPI Amagarapati mendapatkan alokasi pagu senilai Rp. 3.492.000.000,- dengan nilai kontrak senilai Rp 3.479.500.000,- dan terealisasi 100%.

✚ Dermaga PP Waingapu;

Dermaga PP Waingapu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.600.000.000,- total nilai kontrak sebesar Rp. 3.597.600,- dan terealisasi sebesar 100% sesuai dengan nilai Kontrak.

✚ Kolam Pelabuhan Hukung;

Kolam pelabuhan merupakan salah satu fasilitas pokok pelabuhan perikanan untuk perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak Kapal Perikanan. Pelabuhan Hukung mendapatkan alokasi pagu senilai Rp. 600.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 559.890.000,- dan terealisasi 100%.

✚ Kolam Pelabuhan Waingapu;

Pengerjaan Kolam Pelabuhan Waingapu mendapatkan pagu anggaran sebesar 3.600.000.000,- dengan total nilai kontrak sebesar 3.590.100.000,- dan terealisasi sebesar 100%

✚ Tempat Pemasaran Ikan PP Waingapu;

Tempat Pemasaran Ikan berfungsi untuk memperlancar pemasaran hasil penangkapan nelayan. Pengerjaan tempat Pemasaran Ikan PP Waingapu mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 990.000.000,- dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 986.800.000,- dan dapat terealisasi sebesar 100% dari total kontrak yang ada.

✚ Fasilitas Air (tawar) Bersih di PP Amagarapati;

Fasilitas Air (tawar) Bersih merupakan salah satu bagian penting dalam menjalankan operasional pelabuhan perikanan, bagian yang di maksud adalah sebagai sumber penyaluran air tawar yang disediakan untuk kapal-kapal yang berlayar. PPI Amagarapati mendapatkan alokasi anggaran untuk penyediaan Fasilitas air (tawar) bersih sebesar Rp. 200.000.000 dengan total nilai kontak sebesar Rp. 199.960.000,- dan terealisasi sebesar 100%.

✚ Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo) PP Waingapu.

Selain fasilitas air (tawar) bersih, dalam menjalankan operasional pelabuhan juga memerlukan sumber daya listrik dimana salah satu kebutuhan ialah Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk trafo). Pengerjaan Jaringan dan

Instalasi Listrik (termasuk trafo) PP Waingapu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 596.190.000,- dan terealisasi sebesar 100%.

b. Program Perikanan Budidaya

Program Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.245.400.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 1.646.497.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.560.067.000,- atau 94,75%. Adapun kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.526.000,- dan realisasi sebesar 13.526.000,-.

- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

Kegiatan ini didukung pagu sebesar Rp. 1.616.971.000,- dengan nilai realisasi sebesar Rp. 1.539.741.000,- atau sebesar 95,22%. Kegiatan ini meliputi:

- ✚ Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa 50 paket Lele/Nila Pekarangan yang merupakan realisasi dari Program Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya (PEKOSOSBUD) yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Timur;

- ✚ Penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul, Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon, Rehabilitasi Saluran Air Pasok dan/atau Buang, Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan dan Penyediaan Sumber Air. Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 dimana lokasi kegiatan tersebut pada Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Noekele.

- Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Budidaya (PB) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- ✚ Sampel Monitoring Penyakit Ikan Yang diuji

Pelaksanaan monitoring penyakit ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan Bab III bagian Kesatu bertujuan untuk pengambilan dan pengujian sampel ikan, serta pengumpulan data dan informasi dilapangan untuk monitoring aktif.

Monitoring penyakit ikan merupakan salah satu kegiatan pengendalian penyakit ikan yang outputnya dapat digunakan dalam upaya pengendalian

penyakit ikan baik pada level usaha, Kawasan/sentra budidaya, administrative pemerintah (antar daerah), dalam suatu Negara, ataupun perdagangan produk perikanan antar negara. Monitoring penyakit ikan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan komoditas yang menjadi target dalam pelaksanaan monitoring adalah komoditas utama, sedangkan target penyakit ikan merupakan penyakit ikan penting yang mengacu pada KEPMEN-KP 28 Tahun 2023 tentang Jenis Penyakit Ikan yang berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan. Pengujian sampel ikan yang telah diambil dilakukan di Stasiun Karantina Ikan dan Pengendali Mutu Kupang. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 16.913.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 100% yang berlokasi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kab Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu dengan sasaran unit pembenihan dan pembudidaya ikan dengan output terlaksananya kegiatan pantauan terhadap penyakit ikan Pada kelompok masyarakat.

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 219.264.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 219.257.000,- atau 99,99% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Layanan data dan informasi
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu dilaksanakan koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam bentuk Validasi Data Bidang Perikanan Budidaya untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, meta data, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 79.875.000,- dengan output dari kegiatan ini adalah tersedianya data budidaya bidang perikanan budidaya.
- Layanan perencanaan dan penganggaran
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan merupakan salah satu bagian dari unsur pengendalian/kontrol dalam pelaksanaan setiap program/ kegiatan Ditjen Budidaya yang dilaksanakan dari rencana

yang telah ditetapkan. Pagu kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.134.000,- sedangkan output dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dirjen Budidaya.

- Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Sebagai pendukung kinerja pelaksanaan dari program yang dilakukan, kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan satker lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya memegang peran penting dalam memastikan program yang dilaksanakan tepat waktu dan sasaran. Metode pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola. Pagu kegiatan ini adalah sebesar Rp. 49.455.000,- dengan output dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Monitoring Bantuan Program Pemerintah Kepada Masyarakat Pembudidaya.

- Layanan Manajemen Keuangan

Sesuai PMK Nomor 248/PMK.07/2010 menyatakan bahwa setiap satker/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi diwajibkan menyampaikan laporan keuangan meliputi Arsip Data Komputer (ADK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan neraca ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B) E1 di setiap bulannya. Pagu kegiatan ini adalah sebesar Rp. 72.800.000,- dengan output terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

Kegiatan strategis di bidang Perikanan Budidaya meliputi:

- Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan

Pada Tahun 2024, terdapat alokasi penganggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bagi Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Noekele yang berada di Kabupaten Kupang meliputi:

- Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/pakan alami/tandon BBIS Noekele Bertujuan untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal dengan nilai kontrak sebesar Rp 45.000.000,- dan terealisasi 100%.

- ✚ Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) BBIS Noekele
 Sarana pendukung penyaluran air dari sumber mata air ke masing-masing kolam/bak pemijahan. Pada Tahun 2024, BBIS Noekele mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 50.400.000,- dengan nilai kontrak senilai Rp 50.390.000,- dan terealisasi seluruhnya.
- ✚ Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenuhan BBIS Noekele
 Rehabilitasi tersebut berupa pengerjaan jalan akses ke lokasi BBIS Noekele dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 775.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 726.820.000,- dan terealisasi sebesar 100% dari total nilai kontrak.
- ✚ Penyediaan induk unggul dan pakan induk unggul pada BBIS Noekele
 Tujuan dari kegiatan Penyediaan induk unggul ialah tersedianya induk unggul sehingga dapat menghasilkan benih ikan yang berkualitas dan produktif. Induk unggul yang dimaksud ialah induk ikan Lele dan Nila dengan total nilai pagu sebesar Rp. 150.000.000,- dan nilai kontrak sebesar Rp. 149.850.000,- dan terealisasi sebesar 100%, sedangkan penyediaan pakan induk unggul bertujuan untuk menyediakan gizi yang tepat dan seimbang untuk memaksimalkan produksi ikan, pagu kegiatan pengadaan pakan induk unggul ini sebesar Rp. 120.000.000,- dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 119.7000.000,- serta terealisasi sebesar 100%.

3. Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing

a. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 866.919.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 616.284.533,- atau 71.09% dengan rincian kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

- Pengawasan Pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil dengan kegiatan pagu anggaran sebesar Rp 257.304.000,- dan realisasi sebesar Rp. 144.604.000,- dengan kegiatan Gelar Operasi Pengawasan Rutin yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebanyak 1 (Satu) kali Gelar Operasi Pengawasan. Operasi ini di laksanakan di WPP-NRI 573 yaitu Perairan Pulau Kambing, Laut Sawu, Teluk Kupang, Perairan Pulau Kera, Pantai Selatan Pulau Timor, Pantai Utara Pulau Timor dan Perairan Selat Semau. Pada kegiatan ini dilakukan pemeriksaan administrasi dan alat tangkap yang digunakan terhadap 15 (lima belas) kapal nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan dilaut dan ditemukan 2 (dua)

kapal yang tidak lengkap secara administrasi sehingga dilakukan pembinaan. Selain dari bidang PSDKP pengawasan ini juga dilakukan di Cabang Dinas kelautan dan Perikanan Wilayah II (Flores Timur, Sikka dan Lembata) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Perairan Kepulauan Alor dan Lut Sekitarnya.

- Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil dengan pagu anggaran sebesar Rp 134.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 64.668.000,- dengan kegiatan Gelar Operasi Pengawasan Rutin yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebanyak 1 (Satu) kali Gelar Operasi Pengawasan. Operasi ini dilaksanakan di WPP-NRI 573 yaitu Perairan Pulau Kambing, Laut Sawu, Teluk Kupang, Perairan Pulau Kera, Pantai Selatan Pulau Timor, Pantai Utara Pulau Timor dan Perairan Selat Semau. Pada kegiatan ini dilakukan pemeriksaan administrasi dan alat tangkap yang digunakan terhadap 10 kapal nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan dilaut dan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal tersebut. Selain dari bidang PSDKP pengawasan ini juga dilakukan di Cabang Dinas kelautan dan Perikanan Wilayah II (Flores Timur, Sikka dan Lembata) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Perairan Kepulauan Alor dan Lut Sekitarnya.
- Penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 440.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 401.600.533,-. Kegiatan ini berupa pengadaan bantuan perlengkapan POKMASWAS di Kabupaten Alor dan bantuan Perahu POKMASWAS di kabupaten Flores Timur dimana kedua bantuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang PSDKP juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

Kegiatan Pembinaan POKMASWAS

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 86.600.000,- dengan realisasi kegiatan sebesar 99,96% atau sebesar Rp. 86.561.200. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 (empat) lokasi yaitu di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Lembata. Output dari kegiatan ini adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP sejumlah 24 Pokmaswas.

- Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan pengawasan perikanan

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 108.000.000,- dengan realisasi kegiatan sebesar 99.94%. Kegiatan ini terdiri dari:

- Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Perikanan

Kegiatan ini berupa Rapat Persiapan Pelaksanaan kegiatan dan Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi/benchmarking perencanaan pengawasan di Jakarta.

- Sosialisasi Pengawasan Perizinan berbasis risiko lingkup Provinsi

Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Perikanan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024 – Rabu, 25 September 2024, bertempat di hotel Sylvia Kupang dengan peserta kegiatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Timur, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Alor, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kupang, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sabu Raijua, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao, Kepala Dinas Perikanan Kota Kupang, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Kepala Bidang Budaya dan PRL Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Kasubag PDE Dinas Perikanan Kabupaten Alor, Kepala Seksi PSDKP KCD Belu, TTS, TTU, Malaka, Stasiun PSDKP Kupang dengan narasumber sebagai berikut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI : Ir. M. Eko Rudianto, M. Bus.IT, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Anggi Misaful Bewani S.T., M.Sc) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur (David A. Mandala, M.Kes), Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ir. Agustinus Bulu) dan Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Mery M. Foenay, S.Pi, MP)

- Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Perikanan
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan perikanan.

Kegiatan strategis bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi:

- Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan

Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi pagu anggaran senilai Rp 330.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.127.200,- yang terbagi kedalam 2 (dua) paket pekerjaan, meliputi:

-  Perlengkapan POKMASWAS di Kabupaten Alor

Merupakan peralatan dan sumber daya pendukung lainnya yang digunakan POKMASWAS untuk membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya. Tahun 2024 terdapat 4 POKMASWAS di Kabupaten Alor yang menjadi fokus yaitu POKMASWAS SATU HATI (Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut), POKMASWAS OMIAUNG (Kelurahan Pura, Kecamatan Pantar Timur). Jenis perlengkapan POKMASWAS terdiri dari rompi POKMASWAS, Headlam, Kamera DSLR, Kamera Digital, GPS, Teropong Binocular, Teropong Monocular dan Papan Nama Pokmaswas.

-  Perahu POKMASWAS di Kabupaten Flores Timur

Perahu POKMAS ini Sebagai sarana transportasi dan pengawasan di wilayah pesisir dan perairan di Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. Pengadaan perahu POKMASWAS ini bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) dengan ukuran perahu sebesar 2 (dua) Gross Ton (GT).

4. Meningkatnya status pangan berbasis perikanan

a. Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar. Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 15.000.000 dengan realisasi sebesar 100% dimana kegiatan ini berupa Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap mutu dan keamanan produk perikanan baik dalam kegiatan ekspor maupun impor produk perikanan serta merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin keamanan pangan untuk masyarakat yang mengkonsumsi produk perikanan. Dalam proses sertifikasi SKP, Kementerian melibatkan Dinas dalam rangka pendampingan Pra-SKP dan monitoring UPI ber-SKP.

Capaian kegiatan ini adalah pelayanan dan pembinaan SKP yang dilakukan terhadap 17 (tujuh belas) Unit Pengolah Ikan (UPI) dengan rincian total Rekomendasi penerbitan SKP sebanyak 19 Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Pengolahan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- ✚ Layanan Dukungan Manajemen Internal

- Satu Data KP bidang PDSPKP tahun 2024

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengambilan data sampel di lapangan melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha bidang PDSPKP dengan menggunakan panduan kuesioner yang sudah ditentukan. Data hasil wawancara dimaksud, kemudian dientri dalam aplikasi Satu Data KP. Data yang dikumpulkan meliputi data profil dan produksi pelaku usaha, yang terdiri dari UPI, UPPN/UPHPN, Pelaku Usaha Coldstorage dan data lainnya. Pengumpulan dan entri data sampel dilaksanakan mulai tanggal 01 – 15 setiap bulan. Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 112,558,000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya layanan data statistik perikanan ditjen penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

- ✚ Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah

- Industri pengolahan yang dibina oleh daerah

Sertifikat Kelayakan Produk (SKP) merupakan salah satu bentuk dari penerapan standar produk perikanan terhadap aspek Good Manufacturing Practice (GMP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI) baik skala menengah-besar maupun skala mikro-kecil. Kegiatan ini berupa Pembinaan pra SKP/ GMP sertifikat yang dimaksudkan agar produk yang dihasilkan mempunyai penampilan dan mutu yang baik dan terjamin keamanannya pada saat dikonsumsi dalam rangka memenuhi tuntutan pasar domestik dan pasar internasional.

Capaian kegiatan ini yaitu Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/Sertifikat Good Manufacturing

Practices (GMP) oleh Daerah. Pelayanan dan pembinaan SKP telah dilakukan penerbitan SKP dan dalam proses penerbitan totalnya sebanyak 42 (empat puluh dua) SKP yang tersebar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Kegiatan Kampanye Gemarikan yang dilaksanakan oleh daerah

- ✚ Hari Ikan Nasional (Harkarnas).

Tujuan peringatan Harkannas adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai sumber pangan yang kaya akan protein. Peringatan ini juga bertujuan untuk memperbaiki gizi dan ketahanan pangan nasional. Perayaan Hari Ikan Nasional ini dilaksanakan di Kota Kupang dengan jumlah peserta sebanyak 435 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima) Peserta.

- ✚ Safari Gemarikan.

Safari Gemarikan adalah kegiatan edukasi dan promosi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi ikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dimana Kegiatan ini berupa pemberian makanan olahan ikan berupa bakso ikan kepada 1.000 (seribu) anak PAUD di alun-alun rumah jabatan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Gemarikan tahun 2024 ini dilaksanakan secara Dekonsentrasi di 34 Provinsi dengan alokasi 1 Kabupaten/Kota per provinsi.

3.1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Anggaran

Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalami beberapa kali refocusing yang berdampak pada efisiensi anggaran program/ kegiatan pada tahun 2024. Efisiensi anggaran secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja dari program/ kegiatan yang mendukung IKU. Penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung melalui APBD sebesar Rp. 47.394.205.908,- dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp 47.151.072.967,- realisasi keuangan TA. 2024 sebesar Rp 44.466.712.289,- mencapai 94,31%. **Anggaran yang tidak dapat terserap sebesar Rp 2.682.360.678,- atau 5,69% dari total alokasi APBD.**

b. Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, Cabang Dinas dan seluruh instalasi dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

c. Waktu Pelaksanaan

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan cukup terhambat dikarenakan *refocusing* dan dampak situasi pandemic Covid-19 yang belum seutuhnya pulih serta adanya Bencana Alam yang terjadi di Kabupaten Flores Timur. Sebagian besar kegiatan baru dipacu pada Triwulan IV untuk mencapai target kinerja.

d. Sarana dan Prasarana Penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana serta operasional penunjang pada Cabang Dinas untuk menjangkau lokus dan titik-titik sentra kelautan dan perikanan juga berpengaruh terhadap capaian kinerja dinas.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

Belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dengan berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja. Penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung melalui APBD sebesar Rp. 47.394.205.908,- dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp 47.151.572.967,- realisasi keuangan TA. 2024 sebesar Rp 44.466.712.289,- mencapai 94,31%. Pagu ini untuk membiayai 6 (enam) Program dengan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan.

Tabel 3.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.282.662.908	19.018.762.947	17.227.164.299	90.58	100
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	741.107.768	753.139.731	673.924.665	89.48	100
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.338.338.000	12.867.584.999	11.932.153.673	92.73	100
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.240.000	8.240.000	8.240.000	100	100
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0	0	
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.072.000	167.520.000	77.792.931	46.43	100
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	103.597.000	107.705.000	7.106.800	6.60	100
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.465.179.340	4.651.478.817	4.296.705.536	92.37	100
1.09	Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.128.800	413.094.400	231.240.694	55.98	100
02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.284.854.000	1.646.497.000	1.560.067.000	94.75	100
2.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	374.854.000	379.854.000	379.854.000	100	100
2.02	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	910.000.000	910.000.000	896.730.000	98.54	100
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	24.690.320.000	24.314.540.020	23.845.716.057	98.07	100
03.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut SampaiDengan 12 Mil	5.830.727.000	5.272.354.860	5.131.397.900	97.33	100

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
03.03	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	2.500.000	0	0	100
3.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	49.852.160	18.634.000	37.38	100
3.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	18.809.593.000	18.989.833.000	18.695.684.157	98.45	100
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.245.400.000	1.646.497.000	1.560.067.000	94.75	100
4.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	15.000.000	14.526.000	13.526.000	93.12	100
4.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.230.400.000	1.631.971.000	1.546.541.000	94.77	100
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	875.969.000	866.919.000	616.284.533	71.09	100
5.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	875.969.000	866.919.000	616.284.533	71.09	100
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100.00	100
6.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100.00	100

3.2.2. Realisasi Pendapatan Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan Target Penerimaan Daerah sebesar Rp. 9.500.000.000 dan tidak mengalami perubahan selama tahun 2024 akan tetapi terdapat sumber pendapatan baru seiring di keluarkannya Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Per 31 Desember Tahun 2024 mencapai 87,39% atau Rp. 8.301.833.723,17,- dengan rincian pendapatan sebagaimana dibawah ini:

Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Jenis Penerimaan	Target (Rp) Penerimaan	Realisasi	%
1	2	3	4
A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.800.000.000	4.274.148.560,17	152,65
1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.800.000.000	4.274.148.560,17	152,65
B. Retribusi Tempat Khusus Parkir	200.000.000	216.940.000	108,47
1. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	200.000.000	216.940.000	108,47
C. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.031.407.600	632.328.043	61,31
1. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.031.407.600	632.328.043	61,31
D. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.468.592.400	3.178.452.620	58,12
1. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	5.468.592.400	3.178.452.620	58,12
JUMLAH	9.500.000.000	8.290.992.946	87,27

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan triwulan berikutnya, juga dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi dana APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 47.394.205.908,- (empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan mengalami *Refocusing/* perubahan menjadi Rp 47.151.572.967,- (empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan realisasi keuangan TA. 2024 sebesar Rp. 44.466.712.289,- (Empat Puluh empat miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau mencapai persentase 94,31%.

Secara umum capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 berkategori baik yang terdiri dari 7 indikator sasaran strategis dan 8 indikator kinerja utama yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 indikator capaian kinerja sasaran strategis yang melebihi dari target yang telah ditetapkan dan 4 indikator capaian kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target;
2. Terdapat 4 indikator capaian kinerja utama yang melebihi dari target yang telah ditetapkan dan 4 indikator capaian kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target.

Indikator capaian kinerja sasaran strategis yang masih perlu ditingkatkan capaiannya yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah;
3. Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan;
4. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola.

Sedangkan capaian kinerja utama yang masih perlu ditingkatkan capaiannya yaitu:

1. Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian;
2. Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah;
3. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan;
4. Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui fokus dan prioritas program serta pemerataan antar wilayah di Nusa Tenggara Timur, meliputi:

1. Peningkatan pemberdayaan/ bantuan pemerintah bagi nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar produk hasil perikanan;
2. Perluasan akses pasar, promosi, investasi maupun permodalan usaha untuk nelayan/ pembudidaya/ pengolah/ pemasar;
3. Meningkatkan pembinaan POKMASWAS yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota serta bantuan sarana dan prasarana pengawasan bagi POKMASWAS;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik.

Akhirnya pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dan cita-cita walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu kerja keras untuk dibenahi.

**LAMPIRAN LEMBARAN VERIFIKASI
LEVEL 1**

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Verifikator : Sekretaris

Lembar Koreksi :

1. Sesuaikan Kembali berdasarkan sistematika penulisan.
2. Sesuaikan kembali hasil capaian kinerja dengan target pada Perjanjian Kinerja (PK) 2024.
3. Lengkapi dengan dokumentasi kegiatan Dinas.

Kupang, Februari 2025
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Stefania Tunga Boro, S.Pi, MM

Pembina TK

NIP. 197307141998032011

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Verifikator : Kepala Sub Bagian Keuangan

Lembar Koreksi :

1. Perhatikan kembali anggaran dan capaian realisasi belanja pada SPJ Fungsional (final).
2. Sesuaikan kembali sumberdaya asset Dinas.

Kupang, Februari 2025

Kepala Sub Bagian Keuangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Florentina B. Pereira, S.Sos

Penata Tk

NIP. 197206302002122005

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Verifikator : Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Lembar Koreksi :

1. Koordinasikan hasil kegiatan dengan bidang teknis.
2. Perhatikan perhitungan capaian kinerja disesuaikan dengan rumusan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Kupang, Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Nusa Tenggara Timur,



NIP. 196809151995031004

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Verifikator : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Lembar Koreksi :

1. Sesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru Dinas, Cabang Dinas dan UPTD.
2. Sesuaikan dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) terbaru Dinas.

Kupang, Februari 2025

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Rangsi Namin Holbala, SE

Penata Bina

NIP. 197804172007011014

**LAMPIRAN REKAPAN KEGIATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

REKAPAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2024



Gambar 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Menyelenggarakan Syukur Memasuki Awal Tahun 2024



Gambar 2. Penjemputan Nelayan pelintas batas negara Indonesia-Australia yang diantar oleh Pihak Australia ke Kupang NTT



Gambar 3.1 Pemberian Bantuan Stunting kepada 400 anak di SD Assumpta



Gambar 3.2 Pelepasan 4.000 Ekor Ikan di Bendungan Raknamo



Gambar 4. Menerima 2 berkas Kapal Penangkap Ikan dari LANTAMAL VII Kupang, dokumen Kapal Penangkap ikan ini diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT agar dapat dilakukan pembinaan lebih lanjut



Gambar 5. Melakukan pembinaan kepada Nahkoda dan Anak Buah Kapal KM Berkah Melimpah 21 dan KM berkah Melimpah 19, Pembinaan tersebut dilaksanakan di ruangan Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT dan Serah Terima Berkas kapal KM Berkah Melimpah 21 dan KM berkah Melimpah 19 yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ibu Mery M. Foenay, S.Pi, MP kepada Nahkoda kedua nahkoda Kapal.



Gambar 6. Jajaran Pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT Melaksanakan Kunjungan Ke Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Noekele



Gambar 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Ibu Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si beserta Kepala Bidang Pengawasan Ibu Mery M. Foenay, S.Pi, MP menerima kunjungan dari Putri Indonesia 2024 Asal NTT Veronica G. M. Asadoma.



Gambar 8. Koperasi Produsen Militan Jaya Kupang melaksanakan kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-2 bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.



Gambar 9. Kegiatan pertemuan reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Kristal Kupang. Pertemuan reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan ini merupakan hasil dari kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (MDPI)



Gambar 10. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Ibu Mery M. Foenay, S.Pi, MP bersama dengan Perwakilan KKP dan Pemerintah Australia melakukan Peninjauan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan PIC Nelayan Pelintas Batas yang bertempat di Kelurahan Oesapa Kota Kupang.



Gambar 11. Menerima 4 (Empat) dokumen Kapal dan Berita Acara Penyerahan Pelaku serta Barang Bukti dari Ditpolariud Polda NTT



Gambar 12. Melakukan pembinaan dan Memberikan Surat Pernyataan kepada 3 Nahkoda Kapal Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Bantu Kompresor. Pembinaan ini berlangsung pada ruangan bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Gambar 13. Sosialisasi Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Perikanan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota



Gambar 15. Upacara Tabur Bunga dilaksanakan di dermaga Mako Lantamal VII Kupang dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2024



Gambar 16. Aksi Tanggap Darurat Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur



Gambar 17. Keikutsertaan DKP Prov NTT Dalam Kegiatan Parade Tenun



Gambar 18. Keikutsertaan DKP dlm kegiatan GKP2ST (Gerakan Kemanusiaan Penanganan Penuntasan Stunting Terintegrasi) Nusa Tenggara Timur



Gambar 19. Penyerahan Bantuan Hibah Sarana Prasarana Pengawasan Untuk Pokmaswas Mahensa Desa Lewalu Kecamatan Alor Barat Laut



Gambar 20. Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Produksi Garam Provinsi Nusa Tenggara Timur Hotel Kristal Kupang



Gambar 21. Penyampaian terkait pengelolaan MPA di Provinsi NTT dalam kegiatan 10th Marine Protected Area (MPA) Regional Exchange (REX) yang dilaksanakan di Kantor CTI-CFF-Manado.



Gambar 22. BIMTEK *TRAINING OF TRAINER* Respon Cepat Penanganan Spesies Laut Terdampar dan *Bycatch*